



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- :  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023  
Waktu : Pukul 14.25 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta  
Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto (F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI)  
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos./Kabagset. Komisi VII DPR RI  
Acara : 1. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2023  
2. Pengantar RKA-K/L TA. 2024  
Hadir : 30 orang Anggota hadir dari 51 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

**A. Anggota DPR RI:**

**PIMPINAN :**

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. H. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDI.Perjuangan/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
3. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
4. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/ Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
5. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

5 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
2. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
3. Mercy Chriesty Barends, S.T.
4. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph
5. Bambang DH.

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H.M. Ridwan Hisyam
2. Drs. H. Gandung Pardiman, M.M.
3. Drs. Mukhtarudin
4. Bambang Hermanto, S.E.
5. Dyah Roro Esti Widya Putri, BA, M.Sc.

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

2 orang anggota dari 6 anggota:

1. Moreno Soeprapto
2. Dr. Ramson Siagian

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T, BE (Hons), M. Eng.Sc.
3. Rico Sia

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Syaikhul Islam, Lc, M. Sosio.
2. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.
3. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E, M.M.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo
2. Muhammad Nasir

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
3. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

2 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
2. H. Nasril Bahar, S.E.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

0 orang anggota dari 1 anggota:

**B. PEMERINTAH/UNDANGAN**

1. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. (Menteri Perindustrian RI)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/ KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Bapak-Ibu sekalian.

Mari kita mulai Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

*Bismillahirrahmanirahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semuanya,  
Shalom,  
Salam Sejahtera,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan.*

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI, ada nanti Pak Dony, bahkan Pak Maman dan juga Pak Bambang, Pak Haji Bambang. *Nah* jadi kalau menyebut Pak Bambang sekarang harus pakai haji di depan dan demikian pula Pak Eddy Suparno akan hadir nanti.

Yang kami hormati juga Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, ini luar biasa hadir *Insy* Allah hari ini kita semuanya cerah,

Yang kami hormati sudah barang tentu Menteri Perindustrian Republik Indonesia beserta jajarannya, serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Bapak-Ibu sekalian.

Pertama, kita pasti memanjatkan puji syukur kehadirat Allah *subhanahu wata'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa *alhamdulillah* Covid telah berlalu ya, tetapi kita tetap harus waspada ternyata Jakarta adalah salah satu kota terpolusi di dunia sehingga kita semuanya harus tetap menjaga agar kita tetap sehat *wal'afiat*.

Bapak-Ibu sekalian.

Bahwa pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian Anggota Komisi VII yang terhormat dan juga Menteri

Perindustrian Republik Indonesia, bahwa hari ini sesuai dengan jadwal bahwa dalam pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran dengan agenda:

1. Pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2022,
2. Pengantar rencana kerja anggaran kementerian lembaga tahun anggaran 2024.

Berdasarkan data dari sekretariat, yang hadir dalam forum ini adalah 23 Anggota dari 51 anggota dan terdiri dari 8 fraksi dari 9 fraksi, maka dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa, setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup.

Oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan agar rapat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan bersifat terbuka, disetujui Bapak-Ibu sekalian?

Baiklah, atas persetujuan Anggota Komisi VII DPR RI dan dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim*, Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.25 WIB)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sebelum melanjutkan rapat ini kita sepakat bahwa rapat ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam, kalau memang dirasa perlu diperpanjang kita nanti sesuai kesepakatan bersama dan kalau memang sudah dinyatakan selesai apa yang menjadi fokus atau rapat ini maka juga kita bisa dimajukan mungkin, setuju Bapak-Ibu sekalian ya?

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Sesuai Pasal 72 ayat, maaf huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 menyatakan bahwa DPR mempunyai tugas membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LHP LKPP Tahun 2022, BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap upaya yang telah dilakukan Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan



kualitas tata kelola keuangan negara, sehingga memperoleh opini WTP sejak tahun 2008 bahkan, luar biasa apresiasi, tepuk tangan saya kira Bapak-Ibu, ingat ya WTP wajar tanpa pengecualian bukan wajar tanpa pemeriksaan.

Ya, untuk itu Komisi VII DPR RI meminta Menteri Perindustrian untuk menjelaskan tindak lanjut hasil temuan BPK, yang diantaranya mengenai persoalan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Agenda selanjutnya adalah pengantar rencana kerja anggaran Kementerian lembaga tahun anggaran 2024 keputusan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian, tanggal 12 Juni yang lalu menyetujui pagu indikatif Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.760.972.328.000,- dengan usulan, dengan usulan tambahan sebesar Rp1.000.035.600.000,-. sehingga pagunya menjadi Rp4.796.572.328.000,-.

Selanjutnya untuk efektifnya waktu kita persilakan Menteri Perindustrian untuk menyampaikan pemaparannya, dipersilakan yang terhormat.

**MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Dr. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Si.):**

Baik, terima kasih.

*Bismillahirrahmanirahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Selamat siang,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Shalom,  
Om Swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan dan salam sehat.*

Yang kami hormati Ketua Komisi VII DPR RI beserta Pimpinan Komisi VII DPR RI,

Yang sangat kami hormati seluruh Anggota Komisi VII DPR RI dan juga kami hormati seluruh Pejabat Kemenperin yang mendampingi saya dalam rapat kerja kita pada siang hari ini.

Pertama-tama, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami Kementerian Perindustrian untuk menyampaikan laporan kepada Komisi VII terkait LKPP APBN tahun anggaran 2022 dan juga pengantar rencana kerja anggaran Kemenperin tahun 2024.

Pimpinan, segenap Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Adapun mengenai laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan 2022 dapat disampaikan bahwa Kementerian Perindustrian telah



memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun anggaran 2022.

Capaian opini WTP ini merupakan yang ke-15 kali secara berturut-turut semenjak tahun 2008, ini tentu menjadi tantangan bagi kita, bagi kami di Kemenperin dalam mengelola anggaran secara transparan dan juga akuntabel, sehingga opini WTP ini akan dapat terus kami pertahankan di tahun-tahun mendatang.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati.

Pada neraca per 31 Desember 2022 kami Kemenperin menyajikan nilai aset sebesar 11,99 triliun, kewajiban sebesar 41,82 miliar, sedangkan ekuitas sebesar 11,95 triliun dan sepanjang tahun 2022, kami di Kemenperin mencatat pendapatan sebesar 317,73 miliar atau capaian sebesar 118,94%, jadi lebih dari target. Ini yang berasal dari pendapatan jasa layanan yang dilakukan oleh UPT-UPT teknis di lingkungan Kemenperin, seperti BSKJI, Politeknik, SMK bidang industri, serta pendapatan lain yang sah menurut atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada sisi belanja Kemenperin mengelola anggaran sebesar 2,83 triliun dengan realisasi sebesar 2,58 triliun atau 98,31, 98,13% dari total pagu anggaran. Realisasi Kemenperin melampaui realisasi nasional dan kami menempati urutan ke-26 dari 82 kementerian/lembaga pada realisasi tahun 2022 dan ini merupakan capaian tertinggi dari realisasi di Kemenperin sejak tahun 2017.

Ketua, Pimpinan Komisi VII dan segenap Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Realisasi anggaran Kemenperin tahun 2022 berdasarkan program dapat kami laporkan sebagai berikut, yang pertama:

1. Program dukungan manajemen, pagu sebesar 1,40 triliun dengan realisasinya 1,37 triliun atau 97,94%,
2. Program nilai tambah dan daya saing industri, pagu sebesar 745,86 miliar dengan realisasi sebesar 732,22 miliar atau 98,17% dan
3. Program pendidikan dan pelatihan vokasi dengan pagu 482,34 miliar, realisasinya 475,61 miliar atau 98,6%.

Adapun realisasi anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2022 berdasarkan unit Eselon 1 dapat kami laporkan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal sebesar 98,66%,
- b. Direktorat Jenderal Industri Agro 98,06%,
- c. Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil sebesar 99,37%,
- d. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika sebesar 95,82%,
- e. Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka sebesar 98,68%,
- f. Inspektorat Jenderal sebesar 99,05%,

- g. Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri sebesar 97,73%,
- h. Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional 99,66%, dan
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sebesar 98,08%.

Ketua dan segenap Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Adapun hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perindustrian tahun lalu tahun 2022 terdapat 6 temuan, 6 temuan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengenaan tarif PNBPN pada 2 satuan kerja, ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021 dan penatausahaan pendapatan sumbangan pembinaan pendidikan, pendapatan diterima dimuka dan pendapatan yang masih harus diterima pada SMK SMTI Makassar dianggap tidak tertib dan tidak berdasarkan data yang ada.
2. Pembayaran tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri dalam rangka promosi dan temu bisnis pada pameran SIAL atau SIAL Paris 2022, ini ada temuan sebesar 42,98 juta ini dianggap tidak sesuai ketentuan penulisan nominal, disesuaikan dengan judul temuan.
3. Pengelolaan kas oleh bendahara pengeluaran pada 2 satuan kerja Kemenperin dianggap belum sesuai ketentuan.
4. Kekuangan volume pada 3 pekerjaan konstruksi sebesar 915, sebesar 916,56 juta dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar 47,98 juta.
5. Regulasi atas pendapatan yang masih harus diterima dan pendapatan aktual pada Kemenperin yang dianggap belum selaras dan belum lengkap, dan
6. Penatausahaan persediaan pada 7 satuan kerja Kemenperin yang dianggap belum tertib.

Ketua, Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Seluruh permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti berdasarkan Instruksi Menteri Nomor 18 Tahun 2023. Adapun temuan yang berkaitan dengan pengenaan pengembalian belanja telah dilakukan tindak lanjut, sebagai berikut, yang pertama telah dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran sebesar 85,6 juta ke kas negara, yang kedua telah ditayangkan atau dilayangkan surat teguran tertulis oleh Plt. Sekjen pada KPB dan petugas pengelola persediaan pada 7 satker.

Ketua, Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Pada rapat kerja hari ini kami juga ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Komisi VII terhadap anggaran Kemenperin tahun 2024 sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pagu anggaran Kemenperin menjadi 3,76 triliun dan yang tadi disampaikan oleh ketua pada pembukaan rapat kerja kita hari ini bahwa pengusulan tambahan yang sekitar 1,3 triliun



belum dapat jawaban positif dari pemerintah, jadi kami belum ada penambahan dari pagu indikatif.

Postur pagu anggaran Kementerian Perindustrian dalam APBN tahun 2024 yang sebesar 3,76 triliun bersumber dari:

- a. Rupiah murni sebesar 3,4 triliun,
- b. PNBPN sebesar 117,8 miliar,
- c. BLU sebesar 175,2 miliar dan
- d. SBSN sebesar 67,6 miliar.

Rincian alokasi belanja adalah sebagai berikut:

- Belanja pegawai sebesar 827,9 miliar
- Belanja operasional sebesar 403,2 miliar
- Belanja non operasional sebesar 2,52 triliun rupiah.

Dalam pagu anggaran tersebut terdapat alokasi anggaran pendidikan sebesar 950,6 miliar, untuk rincian alokasi anggaran Kementerian Perindustrian tahun anggaran 2024 berdasarkan program dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen sebesar 1,58 triliun,
2. Program nilai tambah dan daya saing industri sebesar 1,74 triliun,
3. Program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 450 miliar.

Adapun rincian anggaran Kemenperin Tahun Anggaran 2024 berdasarkan unit Eselon 1, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal 497,1 miliar,
- b. Direktorat Jenderal Agro sebesar 127,45 miliar,
- c. Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil 177,12 miliar,
- d. Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika sebesar 566,72 miliar,
- e. Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional sebesar 129,21 miliar,
- f. Inspektorat Jenderal sebesar 50,02 miliar,
- g. BSKJI atau Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri sebesar 745,33 miliar, dan
- h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri atau BPSDMI sebesar 976,85 miliar.

Beberapa kegiatan prioritas Kemenperin pada tahun 2024 dapat kami laporkan sebagai berikut:

- Program pendidikan dan pelatihan vokasi, ini antara lain: penyelenggaraan Diklat sistem 3in1, program D3 dan D4 berbasis kompetensi dan juga ada program pembangunan gedung SMK Bogor.
- Program nilai tambah dan daya saing industri, antara lain sertifikasi TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, program perbaikan rantai pasok di industri agro, program restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil, kulit dan alas kaki, program bantuan pemerintah untuk pembelian KBLBB roda dua baru, program

pengembangan kawasan industri, penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru IKM dan fasilitasi sertifikat industri hijau.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Demikianlah paparan yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja hari ini dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas yang terus-menerus diberikan oleh Komisi VII kepada Kemenperin, termasuk pada pelaksanaan program anggaran 2022 dan tahun 2023 ini. Kami juga mengharapkan dukungan kembali pada pelaksanaan program anggaran tahun 2024 untuk pembangunan industri nasional.

Demikian, selanjutnya kami mohon arahan dari segenap Anggota Komisi VII.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(PERGANTIAN PIMPINAN)**

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Pak Ketua, sedikit interupsi.

Ini lihat WTP-nya ini udah sangat lama, berarti udah terjamin ini WTP-nya ini, kita *nggak* usah bahas lagi WTP-nya, diketok aja Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, terima kasih Pak Ramson.

Apresiasi buat Kementerian sudah 15 kali WTP, jadi kita juga mau nanya juga bingung ya, tepuk tangan ya Kementerian Perindustrian.

Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya, kalau *nggak* juga *nggak* apa-apa karena, apa, lebih cepat lebih baik *gitu kan*.

**F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):**



Pimpinan, pimpinan yang 5 kali saja berturut-turut sudah pro forma, masa mau di, ini 3 kali loh.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

15 menteri ini sudah solid semua Pak Menteri, jadi izin kalau boleh nanti program di, programnya juga diperbanyak untuk teman-teman.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, MSc):**

Izin Ketua, kita tambahkan anggaran untuk program-program masyarakat, setuju Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, itu juga kami tadi disampaikan mudah-mudahan program masyarakat bisa bertambah Pak, karena hasil dari teman-teman semua di dapil menyampaikan bahwasanya program-program itu sangat efektif, sangat bermanfaat dan sukses Pak, program ini, Pak.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi Pak Ketua, kalau memungkinkan di tahun ini ditambah sangat bagus sekali *kan*, iya Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya saya pikir cukup ya, iya jangan langsung kesimpulan. Silakan Pak Menteri untuk menjawab apa yang sudah kami sampaikan barusan Pak, semua *applause* buat Pak Menteri buat Kementerian Perindustrian.

Silakan Pak Menteri.

Aman udah *nggak* ada yang nanya ini Pak.

**MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Dr. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA,  
M.Si.):**

Terima kasih.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami di Kementerian Perindustrian yang mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari seluruh Anggota Komisi VII dan kepercayaan ini *Insyah* Allah tidak akan kami sia-siakan, kami akan berikan terbaik. Selain untuk pertumbuhan industri nasional tapi juga untuk

kepentingan dari seluruh Anggota Komisi VII untuk memperhatikan d apil dan konstituen masing-masing.

Kami tetap menunggu arahan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VII mengenai usulan yang pernah kami sampaikan pada rapat sebelumnya, terkait dengan usulan penambahan anggaran bagi Kemenperin yang kemungkinan juga bisa kami arahkan terhadap atau untuk program-program yang tadi disampaikan oleh pimpinan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan manfaatnya sangat besar, selain kita menciptakan *enterprenuer* yang baru, pengusaha-pengusaha baru berbasis industri kecil yang pada gilirannya kita percaya akan bisa menumbuhkan ekonomi nasional.

Jadi kami tetap menunggu arahan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VII mengenai kemungkinan adanya penambahan anggaran yang bisa kita pakai untuk program-program yang tadi disampaikan oleh pimpinan.

Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Pak Menteri.

Jadi poinnya *nih* teman-teman yang ada di Komisi VII hari ini yang juga ada di Banggar, kita coba perjuangkan penambahannya dari BRIN ini, *kok* jadi BRIN *sih*. Ini dari tadi saya habis diserang sama temen-temen yang lain karena masalah BRIN Pak, tanggung jawabnya ada di saya, jadi mulut saya jadinya BRIN, ya kalau perlu punya BRIN digeser sedikit ke Perindustrian.

Iya teman-teman di Banggar untuk memperjuangkan ke anggaran untuk Perindustrian nantinya karena manfaatnya, sekali lagi kita sampaikan cukup bermanfaat buat kita semua Pak. Sekali lagi terima kasih, sudah ya tidak ada lagi kita masuk ke dalam kesimpulan langsung.

Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Kamis 31 Agustus 2023.

1. Komisi VII DPR RI telah menerima laporan keuangan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 dan memberikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas capaian kinerja keuangan tahun anggaran 2022 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP 15 kali secara berturut-turut sejak tahun 2008.

Oke?

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

2. Komisi VII DPR RI mendesak agar Menteri Perindustrian Republik Indonesia menindaklanjuti seluruh temuan laporan keuangan tahun



2022 dan tahun-tahun sebelumnya sesuai rekomendasi BPK RI dan menyampaikan hasilnya secara tertulis kepada Komisi VII DPR RI paling lambat sebelum akhir semester 2 tahun 2023.

Oke.

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

3. Komisi VII DPR RI memahami penjelasan Menteri Perindustrian Republik Indonesia terkait pagu anggaran Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di dalam RKAK/L Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.760.972.328.000,- dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sekretariat Jenderal 497.106.513.000,
  - 2) Ditjen Industri Agro 127.454.425.000,
  - 3) Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil atau IKFT 177.121.282.000,
  - 4) Ditjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE 566.723.777.000,
  - 5) Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka atau IKMA 491.138.301.000,
  - 6) Inspektorat Jenderal 50.025.717.000,
  - 7) Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri BSKJI 745.330.671.000,
  - 8) Ditjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional atau KPAII 129.214.581.000,
  - 9) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri atau BPSDMI sebesar 976.856.991.000.
- Total 3.760.972.328.000.

Dapat disetujui?

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, silakan.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Meskipun sebetulnya sangat-sangat sedikit mungkin tidak berarti, tapi karena ini dokumen resmi. Saya hanya ingin bertanya karena kalau di sini angka terakhirnya 328 kalau di dokumennya Kementerian Perindustrian angka terakhirnya halaman 14 itu 000. Ini siapa yang salah menjumlahkan? Karena item-nya setiap item-nya sama persis.



**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Coba dari kementerian boleh ada yang dihitung lagi, barusan dicek dari kami sekretariat ada pakai excel.

**MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Dr. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA,  
M.Si.):**

Baik Pak, ini mungkin salah kami karena di halaman kami ini pembulatan, jadi ini yang pasti yang bener, mohon maaf.

Terima kasih.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Iya, *punten* ya karena namanya dokumen Pak jadi harus.

**MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Dr. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA,  
M.Si.):**

Kami yang salah.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Oke, terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Yang di kementerian tadi pembulatan Pak, jadi kami yang riil-nya ini Pak.

Oke, setuju?

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

4. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat 7 September 2023.

Silakan Pak Mukhtar.

**F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):**

Pimpinan, Kembali ke nomor 1 Pimpinan, sedikit tapi juga mempengaruhi arti.



Komisi VII DPR RI telah menerima laporan saya kira mungkin bahasa yang paling tepat “dapat menerima laporan keuangan”. Jadi kira-kira karena ini sifatnya *kan* persetujuan kita, kalau telah menerima sifatnya informasi saja, jadi.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Kritis sekali Pak Mukhtar, betul-betul dari Golkar ditekankan, ditekankan, diperjelas.

Oke, nomor 1 saya baca ulang ya.

Komisi VII DPR RI dapat menerima laporan keuangan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 dan memberikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian RI atas capaian kinerja keuangan tahun anggaran 2022 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP 15 kali secara berturut-turut sejak tahun 2008.

Setuju?

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Demikianlah pembahasan kesimpulan rapat kerja pada hari ini, sebelum mengakhiri rapat hari ini kami mempersilakan kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutan penutup.

Kami persilakan.

**MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Dr. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA,  
M.Si.):**

Baik, terima kasih.

Pimpinan Komisi VII, segenap Anggota Komisi VII.

Pertama-tama, saya mohon maaf dan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Diah yang sudah melakukan koreksi, kami tidak akan ulangi itu kesalahan tadi karena itu memang pembulatan saja agar lebih mudah untuk dibaca. Yang kedua, yang ingin kami sampaikan juga sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya jadi seperti yang seringkali kami sampaikan bahwa rupanya kepindahan kami Kementerian Perindustrian dari Komisi VI ke Komisi VII itu tepat sekali, ini supaya wartawan tulis saja.

Jadi semenjak kami pindah ke sini anggarannya naik terus Pak, terima kasih banyak, terima kasih banyak dan kami tidak akan sia-siakan yang sudah menjadi kepercayaan dari Komisi VII DPR RI.

Terima kasih, Pak.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia beserta jajarannya atas kerjasama yang baik pada rapat ini.

Akhirnya dengan mengucapkan *hamdalah* rapat kerja pada hari ini saya tutup.

*Billahittaufiq wal hidayah,*

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.00 WIB)  
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

Dwiyanti, S.Sos  
NIP. 196903131990032002

